

## ABSTRAK

Dalam momentum politik seperti pilkada, praktik politik uang sulit untuk dihindarkan, termasuk pada perhelatan pilkada di Provinsi Bengkulu tahun 2015. Pada pilkada tersebut, pasangan calon Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah dinilai terbukti memberi uang sebesar Rp. 5 juta kepada anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Singaran Pati yang telah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sehingga maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dan pola politik uang pada pilkada di Provinsi Bengkulu tahun 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan yang menjadi sasaran penelitian ini adalah Bawaslu, KPUD dan Tim Sukses. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk politik uang terdiri dari vote buying sebanyak 33 kasus, vote trading sebanyak 2 kasus dan club goods sebanyak 1 kasus. Semua laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal dan materil serta kedaluwarsa kecuai kasus PPK Singaran Pati yang digugat pasangan Sultan-Mujiono ke Mahkamah Konstitusi. Meskipun MK akhirnya menolak gugatan tersebut berdasarkan pertimbangan ambang batas suara antara pemohon dan peraih suara terbanyak dengan selisih diantara keduanya sebesar 14%. Sedangkan pola politik uang yang digunakan kandidat terdiri atas 3 pola yaitu jaringan kekeluargaan, jaringan broker dan door to door. Jaringan kekeluargaan dipilih karena ikatan emosional yang kuat antara anggota keluarga menjadi kekuatan yang solid yang dapat digunakan sebagai kendaraan untuk mendistribusikan uang dan barang dengan penuh kepercayaan. Potensi untuk membelot dan menyeleweng sangat kecil karena faktor ketokohan dalam keluarga. Untuk jaringan broker dipilih karena hubungan komunikasi ke atas dan ke bawah yang baik, sehingga untuk mengambil dan mendistribusikan uang dan barang lebih mudah dan diberi jatah 20-30 orang. Sedangkan pola door to door dipilih sebagai alternatif terakhir jika pola kedua sebelumnya sudah dilakukan. Pada penelitian ini juga ditemukan perilaku pemilih yang menerima politik uang tidak serta-merta mempunyai hutang budi untuk memberikan hak suaranya. Saran dari penelitian ini adalah diharapkan setiap stakeholder baik itu penyelenggara pemilu, kandidat, partai politik dan masyarakat untuk sama-sama terlibat dalam meminimalisir kecurangan praktik politik uang, sehingga tercipta pilkada yang *free and fair*.

**Kata kunci: Politik Uang, Pilkada.**

## ABSTRACT

*In political momentum like general election (pilkada), money politics practice is difficult to avoid, including in general election event in Bengkulu Province, 2015. In the pilkada, candidate Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah proven that they gift money amounting to five million rupiah to members of the Kecamatan Selection Committee (PPK) Singaran Pati which has been sanctioned by permanent dismissal by the General Elections Administrator Council (DKPP). So the purpose of this research is to analyze the shape and pattern of money politics in the general elections on Bengkulu Province, 2015. The method who has been used in this research is qualitative, by using data collection technique which is interview and documentation. While, the target of this research is Bawaslu, KPUD and Team Success. The results of this study indicate that the form of money politics consists of vote buying as many as 33 cases, vote trading as much as 2 cases and club goods as much as 1 case. All of the reports were not followed up because they did not meet the formal and material requirements and the expiry date of the PPK Singaran Pati case sued the pair of Sultan-Mujiono to the Constitutional Court. Although the Constitutional Court finally dismissed the lawsuit based on the consideration of voice threshold between the applicant and the winner of the most votes by the difference between the two by 14%. While, the political pattern of money that candidate used consists of 3 patterns of family network, brokerage network and door to door. The family network is chosen because the strong emotional bond between family members becomes a solid force that can be used as a vehicle to distribute money and goods with confidence. The potential for defection and deviation is very small due to family cohesiveness. For the broker network is chosen because of good upward and downward communication links, so to take and distribute money and goods easier and given 20-30 people. While, the door to door pattern is chosen as the last alternative if the second pattern previously been done. In this study also found the behavior of voters who accept money politics does not necessarily have a debt of gratitude to give the right of voice. Suggestion from this research is expected every stakeholder be it election organizers, candidates, political party and society to equally involved in minimizing cheating money politics practice, so as to create free and fair local election.*

**Keywords: Money politics, local election.**